

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

by Nita Andriyani

Submission date: 11-Nov-2019 10:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1211543221

File name: 272-849-1-PB.doc (1,017.5K)

Word count: 3291

Character count: 23235

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Ratna Aldilla

Ponny Harsanti

Nita Andriyani Budiman

Program Studi Akuntansi, Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Berdasarkan APBN 2016 pajak menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan negara. Di sisi lain, pajak merupakan biaya yang signifikan dari bisnis. Berdasarkan hal ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi biaya pajak melalui *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *nondiscretionary accrual* sebagai pengukuran *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 33 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah.

ABSTRACT

Based on APBN 2016, tax contributes about 70 percent of states revenue. In the other side, tax is a significant cost of business. Based on this, many companies are trying to reduce the cost of the tax avoidance. This study aims to examine the influence of executive character, family ownership, institutional ownership and governance ownership to tax avoidance. This research uses quantitative research design and the data used is secondary data obtained from financial annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2015. Sampling technique using purposive sampling and get 33 companies. The method of analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that the executive character has a negative effect on tax avoidance. The results of this study also found that family ownership, institutional ownership and governance ownership have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance*, Family Ownership, Institutional Ownership, Governance Ownership

PENDAHULUAN

Pajak merupakan urat nadi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, dari Rp 1.822,5 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.820,5 triliun berasal dari penerimaan pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id).

Menurut penelitian terdahulu, dari Praptidewi dan Sukartha (2016) terdapat dua faktor yang mempengaruhi tax avoidance yaitu karakteristik eksekutif dan kepemilikan keluarga. Karakteristik eksekutif bisa dilihat dari besar kecilnya risiko yang diambil oleh perusahaan, yaitu risk taker (pengambil risiko) atau risk averse (penghindar risiko) (Budiman dan Setiyono, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif dengan karakter ini memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula (Praptidewi dan Sukartha, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016) terkait dengan tax avoidance. Penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah sebagai perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Penambahan variabel kepemilikan institusional diyakini mempengaruhi tingkat tax avoidance dalam perusahaan yaitu

semakin banyak nilai investasi yang diberikan ke dalam sebuah organisasi (perusahaan) akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi yang akan mengurangi tingkat tax avoidance dalam perusahaan tersebut (Diantari dan Ulupui, 2016). Penambahan variabel kepemilikan pemerintah dikarenakan keputusan perusahaan yang diawasi langsung oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi tindakan tax avoidance (Purnomo, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif mulai berkembang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1990) untuk menggantikan teori normatif yang dianggap tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu nexus of contracts yaitu, perusahaan sebagai suatu muara bagi berbagai kontrak yang datang kepadanya..

Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba, yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis* (Hipotesis Program Bonus)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan.

2. *The Debt Covenant Hypothesis* (Hipotesis Kontrak Utang)

Hipotesis ini menyatakan jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap *debt covenant*, maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya *debt covenant* dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Pelanggaran terhadap *debt covenant* dapat menimbulkan biaya serta menghambat kinerja manajemen, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencegah atau

setidaknya menunda hal ini dengan cara meningkatkan laba perusahaan.

3. *The Political Cost Hypothesis* (Hipotesis Biaya Politik)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang dinilai tinggi akan mendapat perhatian luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya dapat menarik perhatian pemerintah dan regulator dan akan memunculkan intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi dan berbagai macam tuntutan lainnya sehingga berdampak pada meningkatnya biaya politis.

Tax Avoidance

Tax avoidance mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti. Praktek *tax avoidance* disebabkan dengan adanya berbagai dorongan, salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan laba perusahaan melalui penurunan beban pajak perusahaan (Rusydi dan Martani, 2014). Namun demikian tidak semua perusahaan berani melakukan *tax avoidance*, beberapa penyebabnya adalah sanksi yang akan dikenakan (beban biaya yang akan ditanggung) kepada perusahaan, ataupun adanya perusahaan yang selalu menjunjung tinggi *good corporate governance*, dan ada pula perusahaan yang menganggap *tax avoidance* sama halnya dengan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Karakteristik Eksekutif

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi (Hartono, 2012). Hal ini berarti bahwa semakin besar deviasi antara *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi semakin besar pula risiko yang ada. Besar kecilnya risiko yang diambil perusahaan tercermin pada karakteristik eksekutif yaitu karakter *risk taker* atau *risk averse* (Budiman dan Setiyono, 2012). Semakin tinggi risiko yang

diambil maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, karena adanya paham bahwa semakin tinggi risiko yang diambil semakin tinggi pula keuntungan yang didapat (Butje dan Tjondro, 2014). *Risk taker* tidak pernah ragu untuk melakukan pembiayaan melalui hutang, hal ini dilakukan demi pertumbuhan perusahaan agar lebih pesat. Tipe ini memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula (Praptidewi dan Sukartha, 2016).

H1 : Karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Keluarga

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perusahaannya masih dominan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga. Rusydi dan Martani (2014) mendefinisikan kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan yang memiliki proporsi saham yang dimiliki oleh para keluarga lebih dari 5%.

Pemilik saham keluarga berbeda dengan pemegang saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga dan perusahaan (Praptidewi dan Sukartha, 2016). Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham keluarga tidak mendefinisikan portofolionya dan ingin mewariskan perusahaan tersebut kepada keturunannya. Karakteristik kedua, perusahaan yang dimiliki keluarga lebih peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan karena terkait dengan kelangsungan jangka panjang perusahaan.

H2 : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mendisiplinkan, mempengaruhi dan memonitoring manajemen (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Kepemilikan institusional secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan perusahaan salah satunya kebijakan pajak agresif perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional semakin besar pula monitoring ke dalam perusahaan, maka akan mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif.

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki isentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Diantari dan Ulupui, 2016).

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Pemerintah

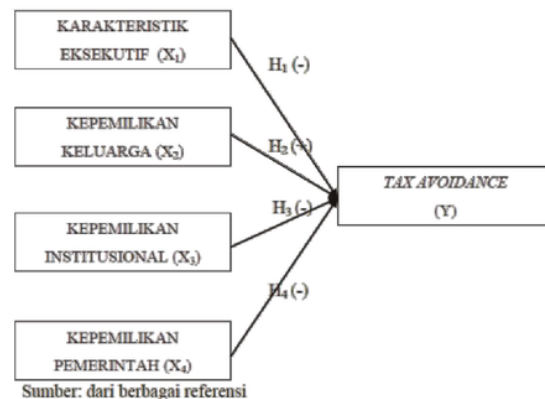
Proporsi saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah atau negara didefinisikan sebagai kepemilikan pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Rusydi dan Martani, 2014). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan pendapatan negara (Rusydi dan Martani, 2014). Pemerintah memiliki otoritas atas industri yang terkait dengan kesejahteraan mayoritas (Purnomo, 2016).

Ketika perusahaan dimiliki oleh pemerintah maka akan terdapat hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dengan

perusahaan. Pemerintah berkepentingan atas perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut sehingga pemerintah selaku pemilik memiliki kepentingan terkait peningkatan nilai perusahaan (Handayani dan Wulandari, 2014).

H4 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013:115). Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015.

Sampel dan Metode Penentuan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:115), sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi. Dalam menentukan sampel untuk penelitian ini digunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel secara tidak acak dengan mempunyai tujuan atau target tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013:131). Tujuan penggunaan metode *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI berturut-turut tahun 2012-2015.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara lengkap selama periode 2012-2015.
3. Laporan keuangan perusahaan diterbitkan menggunakan mata uang rupiah.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
5. Perusahaan merupakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah.
6. Perusahaan dengan *discretionary accrual* bertanda negatif ($DA < 0$).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan periode t dengan periode $t-1$. Uji autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan *Durbin Watson test*, dimana dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai *durbin watson* terletak antara *durbin upper* (du) dan 4 minus *durbin upper* ($4-du$). Dapat diketahui bahwa nilai DW 1,753, ternyata nilai ini lebih dari nilai du dan kurang dari nilai $4-du$ ($1,747 < 1,753 < 2,253$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi autokorelasi terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\text{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

3. Analisis Regresi

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi. Penggunaan analisis regresi linear dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance*. Dengan menggunakan SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:

$$TAX AVOIDANCE = 0,261 - 0,072 X_1 + 0,058 X_2 + 0,172 X_3 - 0,092 X_4 + \epsilon$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,261 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan (bernilai 0), maka rata-rata *tax avoidance* yang dilakukan sebesar 0,261.
2. Koefisien regresi karakteristik eksekutif -0,072 menyatakan bahwa setiap peningkatan *risk averse* pada karakteristik eksekutif sebesar 100% akan menurunkan tingkat *tax avoidance* sebesar 7,2%.
3. Koefisien regresi kepemilikan keluarga 0,058 menyatakan bahwa setiap peningkatan kepemilikan keluarga dalam perusahaan sebesar 100% akan meningkatkan pula *tax avoidance* sebesar 5,8%.
4. Koefisien regresi kepemilikan institusional 0,172 menyatakan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan sebesar 100% akan meningkatkan pula *tax avoidance* sebesar 17,2%.
5. Koefisien regresi kepemilikan pemerintah -0,092 menyatakan bahwa setiap peningkatan kepemilikan pemerintah dalam perusahaan sebesar 100% akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 9,2%.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui bahwa nilai korelasi (R) adalah sebesar 0,448. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah sedang. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,161, yang mengandung arti bahwa 16,1% variasi besarnya *tax avoidance* bisa dijelaskan oleh variasi karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Sisanya sebesar 83,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98).

Berdasarkan uji F tampak bahwa nilai F hitung sebesar 5,031 mempunyai probabilitas (sig) 0,001. Nilai sig ini kurang dari nilai α ($0,001 < 0,05$), hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance*.

6. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*

Variabel karakteristik eksekutif memiliki koefisien regresi -0,072 dan t hitung -2,249 dengan probabilitas (sig) 0,027. Nilai sig kurang dari α ($0,027 < 0,05$), sehingga variabel karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) diterima.

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*

Variabel kepemilikan keluarga memiliki koefisien regresi 0,058 dan t hitung 0,472 dengan probabilitas (sig) 0,639. Nilai sig lebih dari α ($0,639 > 0,05$), sehingga variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) ditolak.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi 0,172 dan t hitung 1,368 dengan probabilitas (sig) 0,175. Nilai sig lebih dari α ($0,175 > 0,05$), sehingga variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) ditolak.

Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance*

Variabel kepemilikan pemerintah memiliki koefisien regresi -0,092 dan t hitung -0,905 dengan probabilitas (sig) 0,368. Nilai sig lebih dari α ($0,368 > 0,05$), sehingga variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis keempat (H₄) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik eksekutif mempunyai koefisien negatif sebesar -0,072 dan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,027 yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis 1 yang menyatakan adanya pengaruh negatif karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* diterima. Tanda negatif koefisien regresi variabel karakteristik eksekutif menunjukkan bahwa semakin *risk averse* karakteristik eksekutif maka akan menurunkan atau meminimalkan tingkat *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga mempunyai koefisien

positif sebesar 0,058 dan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,639 yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tanda koefisien regresi variabel kepemilikan keluarga yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan keluarga tidak mampu meningkatkan terjadinya *tax avoidance* dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini memiliki koefisien positif sebesar 0,172 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,175 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis 3 yang menyatakan adanya pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini memiliki koefisien negatif sebesar -0,092 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,368 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis 4 yang menyatakan adanya pengaruh negatif kepemilikan pemerintah terhadap *tax avoidance* ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil uji hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik eksekutif yang diprosikan dengan *risk averse* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin karakteristik eksekutif bersifat *risk averse* maka semakin dapat

meminimalkan *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016).

2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan keluarga telah mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga besar kecil kepemilikan saham keluarga dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian Aditama (2016).
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan institusional telah mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga besar kecil kepemilikan saham institusional dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian Diantari dan Ulupui (2016).
4. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga besar kecil kepemilikan saham pemerintah dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian Rusydi dan Martani (2014).

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterbatasan yaitu:

1. Variabel independen yaitu karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah hanya mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 16,1%, sehingga masih ada 83,9% lagi pengaruh variabel lain yang turut mempengaruhi *tax avoidance* yang belum diteliti.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan

institusional dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan saham dibandingkan dengan saham beredar tanpa memisahkan antara hak kontrol dengan kepemilikan saham non pengendali. Hal tersebut membuat rentangan data yang sangat jauh, dilihat dari rata-ratanya yaitu kepemilikan keluarga sebesar 0,3423, kepemilikan institusional sebesar 0,1733, dan kepemilikan pemerintah sebesar 0,1341.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka disarankan kepada peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penggunaan variabel-variabel kepemilikan selain kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah yang kemungkinan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti kepemilikan manajerial sesuai penelitian Mahulael dkk (2015) karena manajer selain sebagai pemegang saham juga pihak yang mengambil keputusan dalam perusahaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keputusan yang diambil termasuk melakukan *tax avoidance*. Selain kepemilikan manajerial juga bisa menambahkan variabel kepemilikan asing sesuai penelitian Purnomo (2016) karena semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak asing semakin besar pula kontrol atas perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Penggunaan proksi lain dalam pengukuran kepemilikan yaitu menggunakan jumlah proporsi total kepemilikan saham yang $\leq 20\%$ atau biasa dikenal dengan kepemilikan saham non pengendali sesuai penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016), karena proksi ini lebih

spesifik dan terarah dalam pengukuran kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ahmad. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2.
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1 (702-732).
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Desi dan Hesty Wulandari. 2014. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 7, Halaman 1-10.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1.
- Mahulael, Endang Endari, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom.

- Merslythalia, Dy Retta dan Mienarti Somya Lasmana. 2016. Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 11, 116 No. 2.
- Praptidewi, Luh Putu Mayta dan I Made Sukartha. 2016. Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada *Tax Avoidance* Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.17.1.(426-452).
- Purnomo, Listyo Cahyo. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif. Jurnal BPPK Volume 9 Nomor 1, Halaman 99-108.
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, Lombok.
- Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta *Cost of Equiy capital*. *Simposium Nasional akuntanus XI*. Pontianak.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. *The Accounting Review*, Vol. 65, No. 1, pp. 131-156.

PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

19%

★ Submitted to Udayana University

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%